

## Pertemuan Komite Penasehat Terpercaya ke-10

### Notulensi Pertemuan

Hari/tanggal:	Kamis, 25 November, 2021
Waktu:	13:00 – 15:00 WIB
Lokasi:	Online (Zoom)
Ketua bersama:	Bapak Anang Noegroho (Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas) dan Ibu Henriette Faergemann (Konselor Pertama untuk Lingkungan, Aksi Iklim, dan ICT, Delegasi UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam).
Moderator:	Bapak Rully Amrullah (EFI)
Peserta:	Annex 1 dan Annex 2

### Agenda

1. Informasi dan perkembangan terkini terkait Terpercaya dan KAMI
2. ToR, peta jalan, dan keanggotaan Komite Penasehat Terpercaya
3. Ketertelusuran rantai pasok dan pola pembelian (*sourcing*) bersifat yurisdiksi di bawah KAMI

### Housekeeping dan foto bersama

Bapak Rully Amrullah memaparkan detil tata laksana kegiatan (*housekeeping*) dan agenda sebelum foto bersama diambil.

### Sambutan pembuka

Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh ketua bersama, yaitu Bapak Anang Noegroho dan Ibu Henriette Faergemann.

Bapak Anang Noegroho menyampaikan beberapa poin:

- Acara pertemuan Komite Penasehat Terpercaya ini merupakan kegiatan bertukar pikiran dan informasi yang bersifat terbuka guna mendukung keberlanjutan kelapa sawit, komoditas kunci bagi UE dan Indonesia.
- Sektor perkebunan masih memiliki berbagai tantangan, dan Pemerintah telah memetakan masalah yang dihadapi setiap komoditas. Untuk komoditas sawit, permasalahan kunci diantaranya: komoditas ditanam di kawasan hutan, lahan perkebunan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, perkebunan rakyat belum berkembang, serta pemupukan yang terkendala dana petani. Tingkat produktifitas sawit masih bisa ditingkatkan lebih dari dua kali lipat di tingkat nasional.
- Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi sektor sawit, terutama yang terkait dengan isu keberlanjutan, banyak juga inisiatif yang telah hadir guna menjawab tantangan dalam mempromosikan keberlanjutan kelapa sawit. Inisiatif dimaksud juga mencakup pendekatan yurisdiksi berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan keberlanjutan di tingkat wilayah administratif, bukan hanya di tingkat tapak. Pendekatan yurisdiksi berkelanjutan ini juga sudah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024.

- Terkait dengan pengembangan pendekatan yurisdiksi keberlanjutan, Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi UE yang telah mendukung Terpercaya. Indikator-indikator keberlanjutan pada tingkat daerah telah disusun sehingga bisa dievaluasi apakah daerah memiliki daya dukung yang efektif di sektor perkebunan. Dubes EU baru-baru ini secara resmi menyerahkan Platform Terpercaya kepada Menteri Bappenas. Pemerintah UE juga terus berkomitmen untuk mendukung terwujudnya perkebunan keberlanjutan melalui kegiatan-kegiatan di bawah inisiatif KAMI.
- Langkah selanjutnya adalah pengembangan platform tersebut lebih jauh. Bappenas terus melakukan integrasi Terpercaya ke dalam perencanaan dan penganggaran. Sebagai contoh, indikator Terpercaya dimasukkan ke dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Perkebunan Bappenas dan peraturan Kemendagri mengenai rencana pembangunan daerah. Selain itu, indikator Terpercaya memberikan dukungan analisis untuk transfer fiskal ke kabupaten melalui DAK Pertanian Terpadu. Transfer fiskal tersebut dapat memperkuat kemampuan Pemda mengelola sektor perkebunan secara berkelanjutan.
- Ke depan, implementasi berbagai praktek baik di sektor sawit, diiringi dengan *shared values* para pemangku kepentingan, akan membantu meningkat kualitas berbagai proses dan inisiatif yang tengah berlangsung serta dapat meningkatkan nilai tambah sawit Indonesia.

Ibu Henriette Faergemann menyampaikan poin-poin berikut:

- Proposal legislatif Uni Eropa mengenai deforestasi merupakan kebijakan yang tengah berproses. UE memiliki sejarah panjang bekerja sama dengan Indonesia dalam isu pengurangan deforestasi, tetapi secara global kita belum mampu menghentikan laju deforestasi. Proposal legislatif ini merupakan proposal ambisius untuk mengatasi deforestasi yang disebabkan konsumsi UE, tanpa melihat dimana produknya dihasilkan. Proposal ini merupakan bagian dari *European Green Deal* yang bertujuan mengatasi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- Antara 1990 dan 2020, kehilangan hutan secara global mencapai kira-kira 420 juta hektare, lebih besar dari luas wilayah UE. Data FAO menunjukkan bahwa 90% deforestasi yang terjadi didorong oleh beberapa komoditas pertanian kunci. UE merupakan salah satu konsumen utama komoditas-komoditas tersebut. Impor UE untuk produk dan komoditas yang tercakup dalam proposal peraturan mencapai 60 milyar EUR per tahun.
- Beberapa tahun terakhir ini, UE melakukan konsultasi ekstensif serta analisa dan asesmen dampak, termasuk konsultasi dengan para pihak di UE dan di tingkat global yang menghasilkan 1,2 juta komentar. Tahun lalu, Komisi Eropa juga membantuk platform multipemangku kepentingan mengenai perlindungan dan restorasi hutan dunia, dimana masukan juga diterima dari pemangku kepentingan di Indonesia dan Malaysia.
- Proposal legislatif ini mengedepankan uji tuntas (*due diligence*) wajib serta ketertelusuran (*traceability*) ketat atas komoditas dan produk yang ditempatkan di pasar UE guna mengatasi ilegalitas dan seluruh deforestasi terkait dengan komoditas. Operator wajib menjalankan uji tuntas untuk memastikan komoditas dan produk yang diimpor bebas deforestasi dan legal. Hanya produk demikian yang diizinkan masuk ke pasar UE. Proposal legislatif ini juga menggunakan definisi-definisi FAO dan PBB yang diakui secara internasional untuk mendefinisikan 'bebas deforestasi' dan 'legal'.
- Berbagai opsi dipertimbangkan terkait *cut-off date*. *Cut-off date* yang dipilih adalah 31 Desember 2020, yang sejalan dengan Target TPB 15.2. Oleh karena itu, regulasi ini berorientasi ke depan dan tidak akan menghukum sesiapa untuk aksi-aksi di masa lalu.
- Operator dan pedagang diwajibkan menyediakan geolokasi dari plot tanah dimana komoditas dihasilkan.
- Didasarkan pada analisis komprehensif, peraturan ini pada awalnya berfokus pada enam komoditas yang banyak dikonsumsi UE dan berkontribusi pada deforestasi: daging, kayu, kelapa sawit, kedelai, kopi, dan coklat. Peraturan ini juga mencakup produk turunan tertentu

seperti kulit, coklat batangan, dan lain sebagainya. Daftar produk ini akan terus dimutakhirkan selama implementasi peraturan ini.

- Dengan menggunakan sistem tolak ukur (*benchmarking*), seluruh negara pada mulanya akan dinilai dengan standar resiko tertentu. Standar ini dapat berubah, misalnya menjadi resiko tinggi atau rendah, berdasarkan asesmen yang dilakukan. Standar ini juga akan menentukan tingkat uji tuntas yang wajib dijalankan oleh operator. Kemajuan berarti telah ditunjukkan Indonesia dan Malaysia selama ini, sehingga melalui sistem tolak ukur ini, kedua negara dapat menunjukkan keseriusan menangani berbagai isu.
- UE berencana untuk meningkatkan program kerja sama dengan Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain. Sebagai contoh, proposal legislatif ini juga mencakup ketentuan mengenai dukungan peningkatan kapasitas pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Kerja sama ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk disusunnya kerja sama kehutanan (*Forest Partnerships*).
- Sekarang ini tengah berlangsung diskusi dan negosiasi mendetil antara negara-negara anggota UE dan Parlemen UE mengenai proposal peraturan ini, yang mungkin mengambil masa hingga dua tahun. Perubahan terhadap proposal yang ada dimungkinkan, tetapi mungkin tidak akan signifikan mengingat banyaknya konsultasi yang telah berlangsung sebelumnya.
- Kami akan melihat Terpercaya dan situasi terkini di Indonesia dan Malaysia serta menggunakan inisiatif KAMI untuk menjembatani celah antara situasi masa kini dengan yang disyaratkan oleh peraturan baru UE. Kami akan memastikan ada dukungan yang cukup untuk menjembatani celah tersebut. Kemungkinan usaha ekstra tidak diperlukan, mengingat cut-off date ialah pada 2020.
- Untuk kayu, Indonesia ada pada posisi yang diuntungkan karena Indonesia telah bekerja sama bertahun-tahun dalam isu legalitas melalui mekanisme FLEGT.

Bapak Anang Noegroho berterima kasih pada Ibu Henriette Faergemann untuk presentasi yang telah diberikan serta merespon dengan poin-poin berikut:

- Informasi mengenai proposal legislatif UE terkait bebas deforestasi ini sangat penting bagi Indonesia karena mencakup beberapa komoditas kunci dengan dampak ekonomi dan sosial yang besar.
- Terdapat kebutuhan untuk mengomunikasikan perkembangan-perkembangan terkini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekebun swadaya/kecil, utamanya karena industri perkebunan di Indonesia sebagian besar dijalankan pekebun kecil. Ini dapat dilakukan dengan dukungan KAMI, dengan menggunakan bahasa simpel yang mudah dimengerti.

## **1 Informasi terkini mengenai Terpercaya dan KAMI**

Dr. Jeremy Broadhead, Manajer Proyek KAMI, memberikan gambaran mengenai Terpercaya dan memberikan informasi tentang berbagai aktivitas yang dilakukan sejak Pertemuan Komite Penasehat Terpercaya terakhir kalinya diadakan pada Maret 2021.

- Kegiatan terkait Terpercaya untuk mendefinisikan dan mengukur kelapa sawit yang bebas deforestasi serta menganalisis rantai pasok dan kesempatan untuk verifikasi berbasis wilayah telah berlangsung sejak 2018.
- Melalui Terpercaya, 22 indikator telah disusun. Data terkait masing-masing indikator juga telah dikumpulkan dan disusun dalam platform data yang telah dibuat Inobu, sehingga kemajuan kabupaten menuju keberlanjutan dapat ditunjukkan. Kami terus mencoba dan mengembangkan sistem informasi ini.
- Platform data tersebut telah diserahkan dari UE ke Indonesia oleh Duta Besar UE kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 11 November 2021. Kami senang sekali melihat platform tersebut serta berbagai proses di baliknya tengah dilembagakan ke dalam sistem pemerintah Indonesia.

- Proyek KAMI bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama UE-Indonesia dan UE-Malaysia melalui dukungan dialog internasional terkait kelapa sawit berkelanjutan. Inisiatif Terpercaya menjadi basis dari proyek KAMI karena kerja keras dan dukungan yang telah diberikan berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia. KAMI, yang juga mencakup Malaysia, akan mengembangkan apa yang telah ada di Terpercaya untuk membangun indikator dan pemverifikasi kinerja keberlanjutan yang dapat menyediakan informasi berguna sehubungan proposal legislatif UE mengenai deforestasi.
- Aktivitas dan tonggak pencapaian kunci mencakup pertemuan-pertemuan *Strategic Country Board (SCB)* Indonesia dan Malaysia, yang mengesahkan Rencana Kerja tahun pertama. SCB mencakup perwakilan lima direktorat jenderal UE, lima kementerian di Indonesia, dan berbagai kementerian dan organisasi di Malaysia.
- KAMI sekarang memiliki laman web dan *brief* dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan Malaysia.
- Aktivitas yang dijalankan oleh Inobu dalam KAMI mencakup kegiatan terkait ketertelusuran rantai pasok, pole pembelian (*sourcing*) berbasis yurisdiksi, dan opsi-opsi untuk akuntabilitas, jaminan, dan klaim di bawah Terpercaya. Beberapa brief juga telah dihasilkan.
- CIFOR-ICRAF juga melakukan berbagai kegiatan, utamanya untuk memastikan KAMI melengkapi, dan bukannya bertumpang tindih dengan berbagai inisiatif yang telah ada di Indonesia dan Malaysia. Ini termasuk membandingkan dan mengukur pendekatan-pendekatan komoditas berkelanjutan di kedua negara dan mengukur dukungan yang telah ada untuk keberlanjutan di tingkat wilayah, selain juga melihat dukungan seperti apa yang paling efektif.
- Beberapa *brief* telah dipublikasikan di situs web Terpercaya, terkait dengan topik berikut:
  - Ketertelusuran
  - Klaim, verifikasi dan jaminan
  - Pembelajaran dari inisiatif Terpercaya
- Kami juga tengah mempersiapkan *brief* mengenai 'sejarah Terpercaya', selain juga tiga kertas kerja, yang akan dipublikasikan *online* serta dibagikan melalui *mailing list* dan grup WhatsApp yang diusulkan.
- Kegiatan yang akan datang mencakup penyusunan indikator dan pemverifikasi kinerja keberlanjutan (*Sustainability Performance Indicators and Verifiers/SPIV*) yang akan melengkapi dan mengembangkan lebih jauh indikator Terpercaya. Kami juga tengah melakukan analisis awal terhadap persyaratan yang disebutkan dalam proposal legislatif UE serta informasi apa saja yang telah tersedia di Indonesia yang dapat digunakan oleh operator dalam uji tuntas dan asesmen resiko. Kami tengah mengecek indikator seperti apa yang akan dapat merespon persyaratan utama, dan nampaknya ada persinggungan dengan indikator Terpercaya. Komite Penasehat akan terlibat dalam upaya ini dan Inobu akan terus mendukung platform data Terpercaya, yang diharapkan akan menjadi infrastruktur informasi mengenai SPIV serta dapat mengukur celah yang ada antara situasi di Indonesia/Malaysia dengan ekspektasi dari pasar UE.

## 2 ToR, peta jalan, dan keanggotaan Komite Penasehat Terpercaya

Dr. Jeremy Broadhead mempresentasikan ringkasan dari draf *Terms of Reference (ToR)* untuk Komite Penasehat Terpercaya, yang pernah didiskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya.

- Dalam konteks KAMI dan aktivitas berkenaan proposal legislatif UE, berbagai diskusi mengenai peran Komite Penasehat di masa mendatang telah dilakukan dengan UE, Bappenas, dan Inobu.
- ToR yang diusulkan didasarkan pada konsultasi-konsultasi sebelumnya.

- Dalam ToR yang diusulkan, ketua bersama ialah Bappenas dan UE. Peran Komite Penasehat tetap bersifat konsultatif dan teknis, guna mendukung kegiatan yang telah disetujui oleh KAMI SCB di Indonesia serta memberikan masukan terkait implementasi aktivitas KAMI berkenaan keberlanjutan dan ketertelusuran, termasuk penyusunan SPIV, pengumpulan data, dan pembangunan platform data online.
- Sebagaimana diusulkan, Komite Penasehat adalah komite multipemangku kepentingan, dimana anggota yang diundang oleh ketua bersama berasal dari pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta. Pertemuan setengah hari diadakan kira-kira empat kali dalam setahun dan notulensi pertemuan dibagikan pada seluruh anggota Komite serta anggota KAMI SCB Indonesia. Pertemuan satu-satu dapat dilakukan jika dibutuhkan, dan *mailing list* serta grup WhatsApp akan dibentuk untuk mendukung komunikasi. Kelompok kerja dengan keanggotaan sukarela dapat juga dibuat untuk mendiskusikan isu teknis seperti ketertelusuran.

### 3 Ketertelusuran rantai pasok dan pola pembelian (*sourcing*) berbasis yurisdiksi di bawah KAMI

Dr. Silvia Irawan, Direktur Eksekutif Inobu, mempresentasikan hasil studi mengenai opsi ketertelusuran dan pola pembelian di bawah KAMI/Terpercaya:

- Pertanyaan kunci terkait ketertelusuran diantaranya: apakah terdapat peluang untuk menerapkan ketertelusuran penuh dalam pendekatan yurisdiksi? apakah ketertelusuran penuh dimungkinkan saat ini? apa saja yang perlu dilakukan? Pertanyaan kunci terkait pola pembelian yakni bagaimana pembeli dapat memilih dari kabupaten berkeanjutan. Inobu mewawancarai beberapa perusahaan hulu (produsen dan pabrik) serta perusahaan hilir (perusahaan barang konsumsi) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
- Ketertelusuran di sektor sawit dibatasi oleh kompleksitas rantai pasok sawit yang memiliki banyak pekebun kecil dan aktor informal. Oleh sebab itu, perusahaan banyak bergantung pada *self-declaration* dan seringkali kesulitan melakukan verifikasi. Perusahaan juga enggan untuk membagikan informasi rantai pasoknya karena kekhawatiran terkait privasi komersial.
- Pendekatan yurisdiksi bisa mengatasi berbagai tantangan ketertelusuran, terutama apabila pemerintah terlibat dengan membuat aturan-aturan pendukung. Inobu membandingkan sistem ketertelusuran beberapa perusahaan, utamanya tipe-tipe data yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Terdapat empat perusahaan upstream yang dibandingkan (Permata Group, GAR, Cargil, Wilmar). Mereka memiliki komitmen sukarela terkait ketertelusuran sampai ke level kebun. Selain itu, Inobu juga menganalisis kebutuhan data ketertelusuran yang ada dalam RSPO.
- Berdasarkan analisis tersebut dan wawancara dengan pelaku bisnis, Inobu mengusulkan kebutuhan data untuk pemenuhan ketertelusuran dalam sistem Terpercaya. Ini mencakup data dan identitas minimum apa saja yang perlu dikumpulkan atau dimiliki oleh masing-masing aktor sepanjang rantai pasok. Sebagai contoh, pekebun perlu memiliki STDB dan perlu mencatat volume yang dijual. Pengepul perlu mengumpulkan data STDB dan mencatat dengan baik darimana dan kemana produknya dijual. Pabrik kelapa sawit membutuhkan data agregat produksi dan lokasi yang dapat diverifikasi oleh pemasok selain juga harus menyimpan bukti kepatuhan terhadap regulasi terkait pola pembelian komoditas.
- Tantangan terbesarnya ada pada data di level pengepul. Data terkait STDB memang sudah banyak, tetapi data pada level pengepul masih minim.
- Terkait langkah selanjutnya, Inobu menekankan pentingnya sebuah platform/basis data menyeluruh untuk semua data terkait ketertelusuran yang dikelola oleh pemerintah, yang dianggap sebagai pihak netral oleh para responden. Pemantau independen juga diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas data.
- Terkait dengan pola pembelian berdasarkan yurisdiksi, para responden memberikan ide bagaimana sistem Terpercaya dapat mengidentifikasi dan mengurangi resiko terkait isu

deforestasi, legalitas, tata kelola, dan hak asasi manusia, serta bagaimana kebutuhan uji tuntas dapat dipenuhi/disimplifikasi. Isu kebocoran (*leakage*) juga banyak dibahas bersama isu lain.

- Responden menyebutkan bahwa selama ini perusahaan harus membuktikan keberlanjutan tidak hanya pada level kebun tetapi juga di level grup. Pertanyaannya adalah apakah batas ini dapat dinaikkan hingga ke level batas yurisdiksi. Isu lain yang perlu ditangani misalnya terkait situasi dimana belum tentu perusahaan yang ada di suatu kabupaten berkelanjutan adalah juga perusahaan yang berkelanjutan. Sebaliknya, bisa jadi ada perusahaan berkelanjutan dan bertanggung jawab yang beroperasi di area yang berisiko tinggi. Hal-hal semacam ini perlu dipertimbangkan.
- Inobu mengajukan proposal persyaratan uji tuntas yang dibedakan menurut tingkat resiko suatu kabupaten (resiko rendah dan resiko tinggi). Terdapat beberapa konsep yang diperkenalkan, yakni '*blacklist*' (daftar hitam) serta '*whitelist*' (daftar putih) aktor rantai pasok, pencatatan di level kabupaten (*district registry*), serta daftar aktor yang berkinerja buruk. Tingkat keterbukaan data, ketercakupan *district registry* dan ketertelusuran, maupun kebutuhan pembuktian akan berbeda bagi kabupaten berisiko tinggi dan berisiko rendah.
- Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat didiskusikan dalam pertemuan ini berdasarkan presentasi yang diberikan. Pertanyaan tersebut diantaranya:
  - Apakah Terpercaya dapat berkontribusi pada diskusi terkait pemenuhan persyaratan yang diminta oleh pasar UE dan standar sukarela lainnya?
  - Apakah kelompok kerja khusus diperlukan untuk membahas isu ini?
  - Adakah topik lain yang perlu didiskusikan?

#### 4 Sesi diskusi

Ibu Mila Nuh, Proforest.

- Proforest menjalankan program lanskap di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau, dengan melibatkan delapan perusahaan, termasuk Cargill dan Sinar Mas, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan petani lokal mendapatkan sertifikat yang mereka butuhkan. Kami ingin menjadikan kabupaten-kabupaten tersebut sebagai laboratorium untuk yurisdiksi berkelanjutan. Mungkin mereka dapat dijadikan kabupaten uji coba Terpercaya.
- Proforest telah mendiskusikan secara internal untuk mendukung penggunaan indikator Terpercaya di Siak dan Pelalawan dan mungkin juga di Kutai Timur dan Berau.

Ibu February Ramadhan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

- Direktorat KKSDA mengawasi proyek USAID - Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR). Ibu Direktur telah mengirimkan nota dinas kepada Bapak Anang Noegroho mengenai rencana SEGAR untuk menggunakan indikator Terpercaya dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah di lokasi proyek SEGAR.
- Direktorat KKSDA memohon akses ke data yang ada serta Platform Terpercaya dan berharap untuk dapat secara aktif terlibat dalam proses-proses terkait Terpercaya.

Respon dari Bapak Anang Noegroho.

- Terpercaya merupakan sebetulnya perangkat perencanaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy planning tool*). Bappenas berencana menggunakan Terpercaya untuk mengevaluasi seluruh kabupaten menggunakan metode 'lampu lalu lintas' (*traffic-light method*). Pemerintah berkomitmen menjalankan TPB hingga ke tingkat terkecil pemerintahan.
- Kelapa sawit ditanam di lebih dari setengah keseluruhan kabupaten di Indonesia, sehingga penting bagi Indonesia meningkatkan kepercayaan dan menunjukkan keseriusan dalam mengelola sumber daya alam. Legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan menjadi kunci

dalam membangun produk dan tingkat kekompetitifan di tingkat daerah di masa depan. Kepala daerah perlu menunjukkan bagaimana mereka mengelola sektor perkebunan.

- Seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh direktorat di Bappenas, perlu bekerja sama dan menghilangkan silo untuk membangun platform data dan kebijakan.

Respon dari Dr. Silvia Irawan

- Salah satu Kelompok Kerja yang akan dibentuk dapat membahas isu prototyping lebih jauh, dimana pembelajaran yang diambil akan dapat berguna bagi implementasi di masa mendatang, utamanya untuk memastikan Terpercaya berguna bagi pembeli.
- Dalam fase inisiatif Terpercaya sebelumnya, empat kabupaten (Rokan Hulu, Seruyan, Kotawaringin Barat, and Morowali Utara) telah menjadi kabupaten pilot dimana data telah dikumpulkan.

Bapak Budianto Tjuatja, GAPKI

- GAPKI memberikan dukungan pada UE dan Indonesia terkait keberlanjutan, yang merupakan isu yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
- Kementerian Perindustrian sebaiknya dilibatkan juga dalam diskusi ini, karena kementerian tersebut tengah menyusun aturan mengenai rantai pasok.

Respon dari Bapak Asep Asmara, Kementerian Perdagangan

- Pemerintah serius dalam mengelola produksi sawit secara berkelanjutan. Indikator Terpercaya, yang melibatkan perspektif LSM, telah digunakan sebagai standar evaluasi oleh Bappenas, dan ini menunjukkan komitmen pemerintah.
- Keberlanjutan masih menjadi tantangan. Seiring berjalannya waktu, kita berharap dapat menjadikannya sebagai sebuah nilai tambah yang meningkatkan jenama dan tingkat kekompetitifan kita. ISPO dan Terpercaya dapat menjadi nilai tambah. Ini sejalan juga dengan Rencana Aksi Nasional – Kelapa Sawit Berkelanjutan. Selain itu, kita juga terus melihat ketertarikan dari perusahaan dan petani kecil untuk beroperasi secara berkelanjutan.

Ibu Josi Khatarina, USAID SEGAR

- SEGAR tengah menjalankan sebuah proyek di tingkat daerah dari 2021 hingga 2026 yang mencakup 12 kabupaten. SEGAR memiliki dua tujuan: memperkuat tata kelola lingkungan inklusif berdasarkan pendekatan yurisdiksi dan meningkatkan keberlanjutan rantai pasok di area proyek. Diharapkan kebijakan yang hadir sebagai hasil proyek ini akan didasarkan pada bukti.
- Bagaimana memastikan bahwa data yang diambil dari 10 kabupaten (tidak termasuk Kotawaringin Barat dan Seruyan yang memang sudah menjadi kabupaten pilot Terpercaya) akan dapat diintegrasikan ke dalam platform data Terpercaya dan bagaimana implementasi kebijakan fiskal akan berlangsung?

Respon dari Bapak Anang Noegroho

- Di bawah kebijakan dan platform Satu Data Indonesia, seluruh data akan diintegrasikan. Ini akan mendukung interoperabilitas dengan SEGAR, serta standar pertukaran data. Sebuah Kelompok Kerja yang dibentuk KAMI dan GIZ mungkin akan dibutuhkan untuk membuat standar pertukaran data.
- Kita akan membangun '*big data*' yang akan kita kelola tapi pada akhirnya dimiliki oleh publik. Terkait bagaimana mendapatkan data, di masa depan mungkin kita dapat mempertimbangkan *machine learning* dan sistem kecerdasan artifisial.
- Arah Terpercaya ke depan adalah sertifikasi yurisdiksi. Perspektif '*traffic light*' Terpercaya akan dapat mengidentifikasi kualitas dan kelemahan komponen tertentu (ekonomi, sosial, tata kelola, dan lingkungan) di tingkat yurisdiksi. Selain itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan yang relevan akan dapat terbantu.

- Terkait transfer fiskal, pada 2022 Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pangan dan Pertanian berencana mengalokasikan hampir 1 milyar dolar AS ke kira-kira sebanyak 288 kabupaten. Tujuan transfer fiskal ini adalah untuk meningkatkan kapasitas di tingkat yurisdiksi terkait pembangunan pertanian dan pangan. Untuk menentukan besaran transfer fiskal ke masing-masing kabupaten, indikator Terpercaya akan digunakan.

Bapak Iwied Wahyulianto, GIZ

- GIZ berterima kasih atas kesempatan terlibat dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perkebunan berkelanjutan yang dipimpin oleh Bappenas. Indikator Terpercaya telah diintegrasikan dengan baik ke dalam NSPK.

Bapak Angga Prathama, WWF

- Konsep Terpercaya bermanfaat untuk pemerintah daerah dan seharusnya dapat diintegrasikan tiap provinsi dalam pembangunan daerah.
- WWF tengah menjalankan beberapa proyek yang mempromosikan pendekatan yurisdiksi. Di Aceh, WWF menggunakan '*middle planning approach*' untuk menjaga koridor satwa. Di Kabupaten Melawi dan Sintang, WWF tengah membantu penyusunan rencana perkebunan 20 tahun.
- WWF juga memiliki proyek terkait ketertelusuran dan siap berkolaborasi dalam hal ini. WWF mendukung Terpercaya karena Terpercaya mempromosikan ketertelusuran dan ingin melihatnya diadopsi di semua kabupaten dan sejalan dengan proposal peraturan UE yang baru.

Bapak Soelthon Nanggara, Forest Watch Indonesia (FWI)

- Terkait proposal legislatif UE, pertimbangan lebih jauh harus diberikan terkait *cut-off date* sebagai poin referensi, terutama karena dampak hilangnya hutan mungkin tidak dirasakan sampai beberapa tahun setelahnya.
- Penyediaan ruang bagi pemantau independen atau pihak ketiga penting sebagai instrumen pendukung Terpercaya. Harapannya, ini akan membantu menangkap realita di lapangan. Indikator-indikator yang ada perlu terus diujicobakan dengan tujuan memperkuat kredibilitas sistem yang dibangun.

## 5 Pertanyaan di dalam chat

Ibu Josi Khatarina, USAID SEGAR

- Apa sebenarnya maksud *cut-off date*?

Respon dari Ibu Henriette Faergemann

- *Cut-off date* berarti komoditas yang diproduksi di atas lahan yang dideforestasi sebelum 1 Januari 2021 tidak bermasalah.

## 6 Penutup

Ibu Henriette Faergemann menyatakan beliau sangat senang dengan berbagai komentar dan semangat kerja sama konstruktif yang ditunjukkan dalam pertemuan ini. Beliau menggarisbawahi pentingnya mendengarkan berbagai inisiatif yang tengah berlangsung di Indonesia, dan beliau senang dengan kemajuan yang telah dicapai sehingga kini.

Bapak Anang Noegroho berterima kasih pada Ibu Henriette Faergemann atas kerja sama antara UE dan Indonesia yang telah terjalin. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia serius dan sangat tertarik mengelola sumber dayanya, terutama kelapa sawit, secara berkelanjutan. Untuk mencapainya, kerja sama sangat penting dan harus menjadi dasar dari platform yang dibuat.

Pertemuan berakhir pada 15:05 WIB.

Notulensi disiapkan EFI selaku Sekretariat Komite Penasehat Terpercaya.

26 November 2021

## Annex 1: Daftar Peserta

No	Nama	Jenis Kelamin	Institusi	Posisi
1.	Adinda Laily	P	Directorate General of Regional Development Supervision, Ministry of Home Affairs	Staff
2.	Agnes	P	Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture	Staff
3.	Alexander Hinrichs	L	EFI	Head of Asia Office
4.	Alief	L	Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture	Staff
5.	Anang Noegroho	L	Directorate of Food and Agriculture, Bappenas	Director
6.	Angga Yudha	L	WWF Indonesia	Sustainable Palm Oil Leader
7.	Asep Asmara	L	Ministry of Trade	Director, Forestry and Plantation Product Export
8.	Beria Leimona	P	World Agroforestry (ICRAF)	Scientist
9.	Budianto Tjuatja	L	GAPKI	ISPO Promotion and Socialisation Division
10.	Christine Cullen	P	EFI – KAMI	Expert
11.	Chua Choon Hwa	L	Ministry of Plantation Industries and Commodities, Malaysia	Senior Undersecretary, Palm and Sago Industry Development Division
12.	Dayu Nirma	P	Royal Norwegian Embassy	Advisor
13.	Demak Marsaulina	P	Ministry of Trade	Trade Analyst
14.	Deni Wahyudi	L	GIZ-SCOPP	Advisor
15.	Dyah	P	Directorate of Food and Agriculture, Bappenas	Staff
16.	Evi Wulandari	P	Royal Norwegian Embassy	Project Manager
17.	February Tsamanyah	P	Directorate of Forestry and Water Resources Conservation, Bappenas	Planner
18.	Felix Prasetyo	L	SNV	Project Field Officer
19.	Haryono Sirait	L	CDP	Senior Engagement Officer, States and Regions
20.	Henriette Faergemann	P	EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam	First Counsellor – Environment, Climate Action & ICT

No	Nama	Jenis Kelamin	Institusi	Posisi
21.	Heru Komarudin	L	CIFOR-ICRAF	Researcher
22.	Jeremy Broadhead	L	EFI – KAMI	Project Manager
23.	Josi Khatarina	P	USAID SEGAR	Environmental Governance Lead
24.	M Rifqi	L	Bappenas	Staff
25.	Matej Dornik	L	EU Service for Foreign Policy Instruments	Attaché
26.	Mohd Firdaus Muhammad Ali	L	Ministry of Plantation Industries and Commodities, Malaysia	Principal Assistant Secretary, Palm and Sago Industry Development Division
27.	Mila Nuh	P	Proforest	Regional Landscape Coordinator
28.	Nadia Putri Utami	P	Yayasan INOBU	Researcher
29.	Nur Malik Arifiandi	P	CDP	Policy Engagement Manager
30.	Nurul Wahdiah Anwar	P	USAID SEGAR	Liaison Assistant
31.	Riska Muliawati	P	Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture	Partnership Analyst
32.	Rully Amrullah	L	EFI – KAMI	Expert
33.	Sabrina Manora	P	Ministry of Trade	Trade Facilitator
34.	Safitri	P	Directorate of Forestry and Water Resources Conservation, Bappenas	Planner
35.	Sanath Kumaran	L	EFI – KAMI	Expert
36.	Satrio Adi Wicaksono	L	EFI – KAMI	Expert
37.	Silvia Irawan	P	Inobu	Executive Director
38.	Soelthon Gussetya	L	Forest Watch Indonesia	Head
39.	Smita Tanaya	P	WRI	Staff
40.	Sri Noor Chalidah	P	WRI	Technical Officer for Food System
41.	Stephan Kitzbichler	L	GIZ-SASCI	Advisor
42.	Swetha Peteru	P	CIFOR	Researcher
43.	Taofiq H Nugraha	L	GIZ	Junior Advisor

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Institusi</b>	<b>Posisi</b>
44.	Thomas Wagner	L	EuroCham Indonesia, Envitech Biogas AG	Chief Representative/Head of energy Working Group
45.	Widi Elsa Nursuci Lestari	P	Directorate-General of Plantation, Ministry of Agriculture	Partnership Analyst
46.	Willistra Danny	L		Expert

## Annex 2: Tangkapan layer peserta Pertemuan Komite Penasehat Terpercaya ke-10

